



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik

*The Role Of Political Parties In Providing Political Education Based On Law*

Ersa Nurhalimah<sup>1</sup>, Erlina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

\*Corresponding Author: E-mail: ersanurhalimah01@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

#### Kata Kunci:

Peran Partai Politik

Pendidikan Politik

Partai Politik

#### Keywords:

*the role of political parties*

*political education*

*political parties*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10321](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10321)

### ABSTRAK (Indonesia)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan undang-undang politik. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan, dan teori *check and balance*. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yang berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan keadaan berupa problematika seorang dalam rangka penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peran partai politik sangat penting dalam membentuk pendidikan politik.

### ABSTRACT (English)

*Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties is an organization that is national in nature and is formed by a group of Indonesian citizens voluntarily on the basis of a common will and ideals to fight for and defend the political interests of members, society, nation and state, and maintain the integrity of the Unitary State of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. In this Law, it is mandated the need for political education by paying attention to justice and gender equality aimed at increasing awareness of rights and obligations, increasing political*

*participation and citizen initiatives, and increasing independence and maturity in national and state life. This study aims to analyze the role of political parties in providing political education based on political laws. The approach in this study uses legislation (statute approach), case approach, and conceptual approach. In this study, the framework of the theory of justice and the theory of checks and balances is used. The nature of the research in this study is a study that seeks to find the law in concreto that is appropriate to be applied to resolve the situation in the form of a person's problems in the context of the research being conducted. This type of research is normative legal research. The role of political parties is crucial in shaping political education.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan bersekutu, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada undang-undang ini perlu adanya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asal mula partai politik di Indonesia dapat ditelusuri kembali kemasa penjajahan Belanda, di mana partai-partai politik pertama kali muncul sebagai wadah untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, peran partai politik tetap relevan, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan rakyat, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam proses pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, peran partai politik semakin meluas, menjadi penghubung esensial antara rakyat dan pemerintah.

Setelah reformasi, pemandangan politik berubah drastis, dan jumlah partai politik melejit menjadi lebih dari seratus. Hal ini mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik, seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi di Indonesia. Meski peran partai politik semakin diakui, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kualitas kader partai politik. Kader yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan sebuah partai politik dalam mencapai tujuannya. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat merongrong integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Tak kalah penting, masih adanya praktik politik uang dalam pemilihan umum menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia.

Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah keberadaan partai politik (parpol) sangat strategis dalam kegiatan penyelenggaraan negara serta agenda demokratisasi di era reformasi pasca runtuhnya pemerintahan non demokratis Orde Baru. Perihal korelasi partai politik dan demokrasi Max Weber menyatakan partai politik adalah anak kandung dari demokrasi, mengingat bahwa demokrasi membuka peluang yang besar bagi hadirnya partai politik. Karena secara substantif, demokrasi memberikan ruang terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi termasuk mendirikan partai politik, dalam rangka turut serta menyampaikan aspirasi dan berbicara.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan undang-undang politik. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang mempunyai tujuan menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk penyelesaian keadaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tipe penelitian pada penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kasus atau *case approach* juga digunakan pada penelitian ini tujuannya adalah untuk menunjukkan fakta hukum atas keadaan yang nyata, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* untuk mengemukakan pemikiran terkonsep dalam menyikapi persoalan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, PP RI Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga.

Untuk bahan hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku yang membahas permasalahan umum, dan kamus-kamus hukum. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah melakukan inventarisir dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini. Tahapan dan analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yang merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai hasil tesis dengan kesimpulan tertentu.

## HASIL

### Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan pilar utama dan elemen sentral dalam sistem demokrasi modern. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, partai politik berperan sebagai perwakilan aspirasi rakyat, agen sosialisasi dan pendidikan politik, media rekrutmen pemimpin politik, dan pengatur konflik dalam masyarakat yang majemuk. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bertujuan mengikuti pemilihan umum untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi mencapai tujuan negara. UU ini menegaskan bahwa salah satu fungsi utama partai adalah mendidik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

### Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

### **Kewajiban Yuridis Partai Politik**

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik yang meliputi:

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI);
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

### **Fungsi dan Tahapan Peran Partai Politik**

1. Tahap Input: Menyerap, memformulasikan, dan mempertajam pendapat publik melalui mekanisme internal;
2. Tahap Sosialisasi: Presentasi dan kampanye program partai kepada pemilih;
3. Tahap Implementasi: Implementasi program dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan; dan
4. Tahap Kontrol: Mengkritisi kebijakan negara dan memberikan rekomendasi.

### **Metode Pendidikan Politik**

Bentuk konkret pendidikan politik yang dilakukan partai meliputi:

1. Ceramah penerangan;
2. Kursus kader;
3. Seminar dan workshop;
4. Sosialisasi ideologi partai; dan
5. Pelatihan kepemimpinan.

### **Konsep Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik melalui berbagai bentuk kegiatan seperti memberikan dukungan, kritik, saran, dan feedback terhadap program-program yang dijalankan oleh partai politik.

### **Bentuk Pengaruh Masyarakat terhadap Partai Politik**

1. Penyampaian Aspirasi: Masyarakat menyalurkan tuntutan dan harapan kepada partai politik melalui berbagai saluran komunikasi;
2. Feedback Program: Memberikan evaluasi dan masukan terhadap program pendidikan politik yang telah dilaksanakan;
3. Partisipasi Aktif: Keterlibatan langsung dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan partai; dan
4. Kontrol Sosial: Mengawasi dan menilai kinerja partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik.

### **Dinamika Interaksi Partai Politik dan Masyarakat**

Hubungan antara partai politik dan masyarakat bersifat dua arah (timbal balik) dimana:

1. Partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat;
2. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan politik dan memberikan feedback; dan
3. Kedua pihak saling mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

## **DISKUSI**

### **Landasan Teoritis Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia**

Partai politik merupakan pilar utama dan elemen sentral dalam sistem demokrasi modern. Fungsinya utamanya adalah sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, partai politik berperan sebagai perwakilan aspirasi rakyat, agen sosialisasi dan pendidikan politik, media rekrutmen pemimpin politik, dan pengatur konflik dalam masyarakat yang majemuk. Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bertujuan mengikuti pemilihan umum untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi mencapai tujuan negara.

Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu fungsi utama partai adalah mendidik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Teori ilmu politik modern, seperti yang dikemukakan oleh Budiarjo (1995), menyatakan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi penting:

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah dan sebaliknya, menjadi jembatan komunikasi politik antara warga dan negara.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai sebagai agen sosialisasi politik berperan mengedukasi masyarakat tentang sistem politik, mekanisme pemilu, dan hak-hak politik warga.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai memilih dan menyiapkan kader-kader terbaik untuk posisi politik dan pemerintahan, memastikan regenerasi dan kualitas kepemimpinan.

4. Pengatur Konflik Politik

Partai memainkan peran menengahi dan mengelola konflik sosial-politik agar tetap berada dalam kerangka demokrasi yang sehat.

Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik menjadi pusat "*political centrality*" yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan kebijakan publik. Mereka mengelola kepentingan dan nilai-nilai masyarakat menjadi platform politik yang dapat diusung dalam pemilu serta memastikan implementasi kebijakan yang sesuai aspirasi rakyat. Namun, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti dominasi elit dalam partai, politik uang, dan praktik politik dinasti yang mengganggu proses kaderisasi yang demokratis. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi agar partai politik bisa menjalankan fungsi edukatif dan perannya sebagai pilar demokrasi dengan optimal.

Sistem demokrasi berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dan dalam kerangka itu, partai politik menjalankan peran yang sangat vital. Partai politik tidak sekadar bertujuan untuk meraih kekuasaan, tetapi juga berperan sebagai saluran bagi aspirasi masyarakat. Partai politik di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Partai politik didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai organisasi yang terstruktur untuk meraih kekuasaan politik dengan cara berpartisipasi dalam pemilu.

Menurut Harold Lasswell, partai politik adalah "sekelompok orang yang menginginkan untuk melakukan pengendalian atas pemerintahan". E.E. Schattschneider menambahkan bahwa partai politik adalah organisasi yang membantu menghasilkan kebijakan publik. Partai politik bertanggung jawab untuk merekrut calon pemimpin serta mengedukasi masyarakat mengenai politik. Melalui pendidikan politik, partai berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Partai menjadi lembaga yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, terutama pada pemilihan umum.

Teori pluralisme menganggap bahwa demokrasi seharusnya menyediakan ruang bagi berbagai kelompok untuk bersaing dalam menentukan kebijakan publik. Di Indonesia, pluralisme sangat relevan karena keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada. Dalam konteks ini, partai politik berfungsi untuk merepresentasikan kepentingan beragam kelompok dalam masyarakat. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan banyak partai politik yang bersaing untuk menduduki posisi kekuasaan. "Persaingan" antar partai diharapkan membawa berbagai pilihan bagi pemilih serta mencegah dominasi satu partai atas yang lain.

Teori elit, yang dipopulerkan oleh sosialis Italia Vilfredo Pareto, menganggap bahwa di dalam setiap masyarakat, selalu ada sekelompok kecil individu yang memegang kekuasaan, sedangkan mayoritas masyarakat lainnya pasif. Dalam kerangka partai politik, elit partai adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Penerapan teori elit dalam konteks partai politik di Indonesia menunjukkan bagaimana elit-elit partai di tingkat pusat sering kali menetapkan agenda politik tanpa melibatkan suara akar rumput. Ketergantungan terhadap elit dapat mengakibatkan alienasi masyarakat terhadap partai dan politik secara keseluruhan.

Teori sistem melihat partai politik dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem sosial-politik. Dalam teori ini, partai politik dianggap sebagai komponen dari sistem yang lebih besar, yang mencakup berbagai institusi seperti pemerintahan, masyarakat, dan media. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, fungsi partai politik tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemerintahan dan interaksi dengan publik. Teori ini menekankan hubungan timbal balik antara partai politik dan elemen-elemen lain dalam masyarakat.

Partai politik memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, partai politik menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah, berusaha menjaga stabilitas sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Melalui pemahaman mengenai berbagai teori yang mendasari keberadaan partai politik, seperti teori pluralisme yang menekankan keberadaan berbagai saluran untuk kepentingan masyarakat, serta teori elit yang menunjukkan pentingnya peran elit dalam pengambilan keputusan politik, dapat terlihat betapa kompleks dan dinamisnya landscape politik di Indonesia. Selain itu, teori sistem menekankan hubungan interdependent antara partai politik dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dan politik dalam analisis peran partai politik.

### **Konsep Dan Dimensi Pendidikan Politik Dalam Konteks Kepartaian**

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan warga negara dalam berpartisipasi aktif di bidang politik. Menurut Nur Khoiron (2013), pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai politik, tetapi juga membentuk kesadaran politik, sikap positif, dan keterampilan partisipatif yang penting untuk pengembangan demokrasi yang sehat.

Dalam konteks partai politik, pendidikan politik memiliki fungsi strategis sebagai sarana kaderisasi dan sosialisasi ideologi partai kepada para anggota serta masyarakat pada umumnya. Partai politik bertanggung jawab untuk mengedukasi kadernya agar memahami visi, misi, dan program partai, serta membekali kemampuan dalam berorganisasi, komunikasi politik, dan keterampilan praktis lainnya yang dibutuhkan dalam proses politik.

Dimensi pendidikan politik secara teori melibatkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek Kognitif

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan politik dan sistem politik yang harus dikuasai oleh individu. Dalam konteks kepartian, hal ini mencakup:

- a. Pemahaman tentang Struktur dan Fungsi Partai Politik:

Anggota partai harus memahami bagaimana partai berfungsi dalam sistem politik, termasuk peran dan tanggung jawabnya.

- b. Tahu Tentang Sistem Hukum dan Kebijakan:

Pendidikan politik harus mencakup pengetahuan mengenai undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kebijakan publik yang terkait.

2. Aspek Afektif

Dimensi afektif menyangkut sikap dan emosi individu terhadap politik. Dalam konteks pendidikan politik di partai, dimensi ini mencakup:

a. Membangun Loyalitas Terhadap Partai:

Pendidikan politik harus menumbuhkan sikap loyal dan komitmen terhadap nilai-nilai dan visi partai.

b. Mengembangkan Empati Sosial

Mendorong anggota partai untuk memahami dan merasakan aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.

3. Aspek Partisipatif

a. Keterampilan Berbicara di Depan Umum:

Pendidikan politik harus dapat memberikan kemampuan kepada anggota partai untuk berbicara dan menyampaikan ide-ide secara jelas.

b. Kemampuan Mengorganisasikan Kegiatan:

Kader partai perlu dilatih dalam pengorganisasian acara, kampanye, dan kegiatan politik lainnya yang mendukung tujuan partai.

Metode pendidikan politik yang diterapkan oleh partai meliputi pelatihan kader, workshop, seminar, diskusi, penggunaan media sosial, serta kampanye politik praktis. Contohnya, pelatihan kepemimpinan untuk kader partai yang tidak hanya mengajarkan teori politik tetapi juga praktik berpolitik di lapangan. Seminar dan lokakarya sering diadakan untuk menambah wawasan politik kader dan masyarakat umum, serta memperkuat keterampilan komunikasi dan organisasi politik.

Indikator keberhasilan program pendidikan politik dapat diukur dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, perubahan sikap politik yang lebih kritis dan bertanggung jawab, serta kapasitas kader yang mampu menjalankan fungsi politik secara profesional. Namun, tantangan pelaksanaan program ini meliputi keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pendidikan politik secara efektif.

Pendidikan politik memegang peranan penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pendidikan politik bukan hanya soal pengajaran tentang tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, tetapi juga mencerminkan proses sosialisasi individu ke dalam budaya politik yang ada. Dalam konteks kepartian, pendidikan politik menjadi kunci pembentukan kader yang sadar politik dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bagian ini akan membahas konsep dasar pendidikan politik, dimensidimensi dalam konteks kepartian, serta tantangan dan peluang pendidikan politik di Indonesia.

Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Partai politik membutuhkan kader yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola organisasi dan merespons aspirasi konstituen. Dengan pendidikan politik yang memadai, masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun budaya politik yang mendukung demokrasi, seperti toleransi, dialog, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat yang mengakibatkan kurangnya minat untuk terlibat dalam pendidikan politik. Banyak masyarakat yang merasa tidak terhubung dengan proses politik, sehingga sulit bagi partai untuk mengedukasi mereka. Di banyak partai, dominasi elit dapat menciptakan kesenjangan antara pengurus dan masyarakat. Program pendidikan yang dibangun sering kali tidak mencakup suara dan pengabdian yang dibutuhkan dari lapisan bawah. Banyak partai, terutama yang baru muncul dan kecil, kekurangan sumber daya untuk menyelenggarakan program pendidikan politik yang efektif. Hal ini sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas.

Reformasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam politik dan mendukung pendidikan politik yang lebih menyeluruh. Kesadaran ini perlu dimanfaatkan oleh partai untuk mengimplementasikan program-program pendidikan yang inovatif. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi partai politik untuk menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih

cepat dan efisien. Pemakaian platform online untuk pendidikan politik dapat menarik lebih banyak peserta. Partai politik dapat menjalin kerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan politik dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Pendidikan politik dalam konteks kepartian di Indonesia adalah suatu proses yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan terlibat dalam politik. Konsep pendidikan politik yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat penting untuk membangun kader yang berkualitas. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya minat masyarakat dan dominasi elit, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti penggunaan teknologi dan peningkatan kesadaran pasca-reformasi.

Keberhasilan pendidikan politik di dalam organisasi partai tidak hanya tergantung pada pembentukan kurikulum yang baik, tetapi juga pada komitmen semua level dalam partai untuk memperjuangkan pendidikan politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya pendidikan politik yang efektif, diharapkan partai politik dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

### **Kerangka Hukum Dan Kebijakan Pendidikan Politik Partai Politik**

Pendidikan politik merupakan salah satu faktor krusial dalam mendemokratisasikan proses politik di Indonesia. Untuk itu, penting bagi partai politik untuk memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dalam melaksanakan pendidikan politik. Dengan memahami kerangka hukum yang mengaturnya, serta kebijakan yang diterapkan oleh partai politik, dapat dilihat sejauh mana pendidikan politik menjadi prioritas dan bagaimana hal tersebut memberikan kontribusi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu yang memiliki peran penting dalam proses demokrasi melalui Pasal 22E, yang mengatur tentang pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kerangka ini, partai politik harus menjalankan fungsi yang mencakup pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendorong partisipasi yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Merupakan dasar hukum bagi semua partai politik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala aspek yang menyangkut partai, termasuk mengenai pendidikan politik. Dalam pasal-pasalnya, Undang-undang ini menekankan pentingnya partai politik untuk berfungsi sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik dianggap sebagai bagian dari tugas sosial partai dalam memajukan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur secara khusus fungsi partai politik, termasuk kewajiban menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas. Pasal 34 ayat (3b) menjabarkan kegiatan pendidikan politik yang harus dilaksanakan, seperti pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI), pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta pengkaderan anggota secara berjenjang dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum, termasuk kewajiban partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pasal-pasal yang relevan menekankan pentingnya pendidikan politik dalam rangka membangun partisipasi politik yang aktif dan mendidik pemilih untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Selain Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu juga mengatur pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin menegaskan pelaksanaan pendidikan politik yang melibatkan partai sebagai salah satu peserta pemilu yang wajib memberikan edukasi kepada pemilih.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga mengeluarkan peraturan yang dapat mempengaruhi pendidikan politik, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kampanye

Pemilu. Dalam peraturannya, KPU menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih yang harus dilakukan oleh partai politik sebagai bagian dari kampanye. Ini termasuk penyuluhan tentang sistem pemilihan dan cara menggunakan hak suara. Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh partai dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dipantau oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan hak untuk mengikuti pemilu.

Selain itu, ada peraturan pendukung lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, serta Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda yang memperkuat kerangka kebijakan pendidikan politik nasional. Meskipun kerangka hukum ini komprehensif, dalam implementasinya partai politik masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan yang efektif, dan tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan politik dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Partai politik memiliki kebijakan kaderisasi yang komprehensif untuk memastikan munculnya pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas. Kaderisasi mencakup pelatihan, seminar, dan pendidikan formal yang dirancang untuk membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan politik yang diperlukan. Misalnya, sekolah partai yang diadakan oleh partai besar seperti PDIP dan Golkar. Beberapa partai politik juga meluncurkan program pendidikan politik untuk masyarakat luas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Contohnya adalah sosialisasi melalui media sosial, forum diskusi, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.

Kebijakan kaderisasi dalam partai politik dapat dilihat dari jumlah kader yang terlatih dan siap untuk memimpin dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kader-kader ini sering kali berperan sebagai penghubung antara partai dan masyarakat, membantu dalam menyampaikan aspirasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Meskipun banyak partai politik telah mengeluarkan program pendidikan untuk masyarakat, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Banyak program yang dirasa kurang menjangkau komunitas yang lebih luas, dan lebih fokus pada anggota partai. Untuk itu, perlu ada evaluasi terhadap program tersebut agar bisa lebih inklusif. Salah satu tantangan utama dalam melaksanakan pendidikan politik adalah kurangnya sumber daya, baik finansial maupun manusia. Banyak partai kecil yang tidak memiliki anggaran yang memadai untuk program pendidikan, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas.

Ketidaksadaran politik di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak individu yang tidak memahami pentingnya pendidikan politik, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam program yang ditawarkan oleh partai politik. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara partai politik dan masyarakat. Dominasi elit di dalam partai politik mempengaruhi proses pendidikan. Kader dari lapisan bawah sering kali merasa terpinggirkan, dan suara mereka tidak didengar dalam program-program pendidikan yang disusun. Ini dapat menciptakan jarak antara elit dan anggota biasa, sehingga menghambat partisipasi yang lebih luas.

Setelah reformasi, terdapat peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik. Kesadaran ini membuka peluang bagi partai untuk mengembangkan program pendidikan politik yang lebih komprehensif dan inklusif. Partai politik dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi pemuda untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program-program pendidikan yang dijalankan. Inovasi dalam metode pengajaran dan pelatihan juga menjadi peluang. Menggunakan metode aktif seperti simulasi politik, dialog interaktif, dan diskusi kelompok dapat membuat pendidikan politik lebih menarik dan relevan bagi generasi muda.

Melalui kerangka hukum dan kebijakan pendidikan politik, partai politik di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman politik di kalangan kader dan masyarakat. Program-program pendidikan politik yang dijalankan oleh berbagai partai, seperti PDI-P, Golkar, NasDem, dan PKS, menunjukkan bahwa ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk mendidik dan memberdayakan kader serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan hukum, partai politik diharuskan untuk menjalankan program pendidikan politik, yang menjadi bagian integral dari tugas sosial mereka di masyarakat.

### **Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Program Pendidikan Politik**

Partisipasi masyarakat sipil dalam proses politik merupakan pilar utama dalam demokrasi. Salah satu area penting di mana partisipasi ini sangat signifikan adalah dalam pengawasan dan evaluasi program pendidikan politik. Pendidikan politik yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh partai politik, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sipil dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan program-program tersebut. Artikel ini akan membahas peran masyarakat sipil, cara keterlibatannya, serta pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam konteks pendidikan politik di Indonesia.

Masyarakat sipil merujuk pada sekumpulan organisasi, lembaga, dan individu yang beroperasi di luar pemerintah dan sektor bisnis. Masyarakat sipil mencakup LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi non-pemerintah, kelompok komunitas, serikat pekerja, dan banyak lagi. Dalam konteks politik, masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk program pendidikan politik, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik merupakan aspek krusial dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil (CSO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas akademik berperan sebagai pengawas eksternal yang independen dalam menilai efektivitas dan dampak pendidikan politik yang dijalankan partai. Melalui mekanisme monitoring partisipatif, masyarakat sipil melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek program pendidikan politik, seperti kesesuaian materi dengan kebutuhan sosial-politik masyarakat, metode penyampaian maupun cakupan sasaran yang tepat.

Indikator penilaian efektivitas program ini meliputi peningkatan pengetahuan politik masyarakat, keberhasilan kaderisasi, serta tingkat partisipasi politik aktif yang dihasilkan oleh pendidikan tersebut. Masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi implementasi program pendidikan politik, termasuk melakukan pemantauan independen terhadap program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Ini termasuk memeriksa keuangan dan sumber daya yang digunakan. Menyusun laporan yang mencakup hasil pengawasan, termasuk potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa program pendidikan politik dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat sipil juga penting dalam mengevaluasi kualitas dari program pendidikan politik. Masyarakat sipil dapat mengadakan survei atau forum diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari peserta pelatihan mengenai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Menilai dampak dari program pendidikan terhadap perilaku politik individu dan partisipasi dalam pemilu. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan dalam kesadaran politik dan tingkat partisipasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan politik. Media massa berfungsi sebagai alat pengawasan sekaligus penyampai kritik dan rekomendasi yang konstruktif.

Keterbukaan media dalam meliput program pendidikan politik dan kegiatan partai memberikan tekanan publik untuk menjaga transparansi dan mendorong inovasi dalam metode pendidikan politik yang dijalankan. Pengawasan dari masyarakat sipil berkontribusi besar dalam meningkatkan akuntabilitas partai politik, karena partai menjadi lebih bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan politiknya agar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan warga

negara. Hasil pengawasan ini mendorong perbaikan berkelanjutan yang tidak hanya formalitas administratif, tetapi berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat.

Salah satu tantangan utama bagi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan dan evaluasi adalah keterbatasan pengetahuan mengenai isu-isu politik serta sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan analisis yang mendalam. Partai politik sering kali tidak memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Terkadang, ada resistensi dari partai politik terhadap keterlibatan masyarakat sipil yang dianggap dapat mengganggu upaya mereka untuk mengendalikan program. Masyarakat sipil yang mengkritik atau mengawasi partai politik dapat menghadapi reaksi negatif, seperti intimidasi atau ancaman. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengakibatkan masyarakat sipil enggan untuk terlibat secara aktif.

Memberikan pelatihan kepada masyarakat sipil tentang teknik pengawasan dan evaluasi bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara efektif. Ini termasuk pelatihan tentang cara melakukan audit, pengumpulan data, dan pengukuran dampak program. Menggunakan teknologi, seperti platform digital untuk melakukan survei dan mengumpulkan data dapat memudahkan masyarakat sipil dalam menjalankan tugas mereka. Ini akan mengurangi biaya dan meningkatkan partisipasi individu dari berbagai kalangan.

Beberapa LSM di Indonesia, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Corruption Watch (ICW), terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan pendidikan politik oleh berbagai partai. Mereka sering mengadakan seminar dan diskusi untuk menilai efektivitas program pendidikan politik dan mendorong transparansi. Salah satu contoh sukses adalah inisiatif di mana partai politik mengundang perwakilan masyarakat sipil untuk berdiskusi tentang program-program pendidikan politik dan mendapatkan umpan balik. Forum semacam ini meningkatkan rasa saling percaya antara partai politik dan masyarakat sipil serta memastikan bahwa suara masyarakat diperhitungkan dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan.

### **Mekanisme Feedback Dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Kurikulum Pendidikan Politik**

Kurikulum pendidikan politik merupakan landasan penting bagi pengembangan kesadaran dan partisipasi politik di masyarakat. Namun, untuk dapat efektif, kurikulum tersebut harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mekanisme feedback menjadi krusial dalam memastikan kurikulum pendidikan politik dapat memenuhi harapan peserta didik dan kebutuhan masyarakat luas. Artikel ini akan membahas pengertian mekanisme feedback, cara masyarakat menyampaikan aspirasi, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan politik.

Pendekatan pendidikan politik yang efektif menuntut adanya mekanisme komunikasi dua arah antara partai politik dengan masyarakat sebagai sasaran pendidikan. Mekanisme feedback dan penyaluran aspirasi masyarakat terhadap kurikulum pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa materi dan metode pendidikan politik relevan dan responsif terhadap kebutuhan sosial-politik yang dinamis. Mekanisme feedback adalah proses di mana informasi mengenai suatu program atau kebijakan dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks pendidikan politik, feedback dapat datang dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, dosen/pengajar, masyarakat sipil, dan partai politik. Proses feedback ini berlangsung secara berkelanjutan dan bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum agar relevan dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan adanya feedback, kurikulum dapat ditingkatkan berdasarkan masukan nyata dari peserta didik dan masyarakat. Feedback memungkinkan kurikulum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Mekanisme ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pendidikan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas program. Masyarakat berharap kurikulum pendidikan politik menyediakan materi yang mendalam tentang teori,

praktik, dan kasus investasi lokal dan global. Masyarakat ingin kurikulum dapat memberikan keterampilan praktis yang relevan untuk berpartisipasi dalam pemilu, kampanye, dan proses pengambilan keputusan politik. Materi kurikulum juga diharapkan dapat mencakup isu-isu lokal yang penting bagi masyarakat, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan isu lingkungan.

Dalam praktiknya, berbagai saluran komunikasi digunakan untuk mengakomodasi aspirasi dan masukan masyarakat terhadap konten dan penyelenggaraan pendidikan politik. Forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan masyarakat memungkinkan adanya dialog terbuka antara penyelenggara pendidikan politik dari partai dan masyarakat luas. Survei kepuasan masyarakat merupakan alat evaluasi yang sistematis untuk mengetahui tingkat penerimaan dan efektivitas kurikulum yang dijalankan.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap kurikulum melalui beberapa saluran, antara lain:

a. Survei dan Kuesioner

Melakukan survei untuk menghimpun pandangan masyarakat terkait konten dan metode pendidikan politik yang diinginkan.

b. Forum Diskusi

Mengadakan forum atau seminar untuk mendengarkan pendapat dan ide-ide masyarakat serta memberikan ruang untuk dialog.

c. Umpulan Lengkap

Platform daring, seperti website atau aplikasi, yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung.

Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka peluang luas melalui platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi interaktif untuk mengumpulkan masukan masyarakat secara cepat dan praktis. Saluran ini juga memudahkan partisipasi kelompok muda dan komunitas yang tersebar secara geografis, yang selama ini sulit dijangkau dalam bentuk tatap muka. Responsivitas partai politik terhadap masukan tersebut terlihat dari kemampuan mereka untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan politik agar sesuai dengan karakteristik dan isu-isu lokal serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Peran tokoh masyarakat dan pemimpin opini sangat penting dalam menjembatani aspirasi tersebut agar dapat terserap secara efektif ke dalam kebijakan dan program pendidikan politik partai.

Proses pengumpulan feedback dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya mengundang individu atau kelompok untuk memberikan pandangan mereka secara langsung mengenai program pendidikan politik. Menciptakan diskusi kelompok kecil yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Menyebarluaskan kuesioner kepada peserta didik dan masyarakat luas untuk mendapat data kuantitatif dan kualitatif tentang kurikulum yang sedang berjalan. Setelah feedback dikumpulkan, berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil:

a. Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tren serta masalah yang muncul dalam kurikulum.

b. Penyampaian Hasil

Membagikan hasil analisis kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, dosen, dan masyarakat.

c. Rekomendasi Perubahan

Mengembangkan rekomendasi perubahan berdasarkan analisis feedback untuk disusun dalam kurikulum baru.

Melalui mekanisme feedback ini, pendidikan politik tidak hanya menjadi program formal internal partai, tetapi juga menjadi ruang interaktif yang mendukung demokrasi partisipatif. Dengan demikian, kurikulum pendidikan politik menjadi lebih adaptif, memberdayakan warga negara, dan

mendorong terciptanya masyarakat yang sadar politik serta aktif ikut membangun proses demokrasi. Namun, tantangan tetap ada, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap saluran komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik, serta hambatan birokrasi dalam mengintegrasikan hasil feedback ke dalam materi pendidikan politik partai.

Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan mekanisme feedback yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari lembaga pendidikan atau pengembang kurikulum yang mungkin enggan untuk mengubah kurikulum yang telah ada. Sering kali, feedback yang diperoleh dapat tidak akurat atau tidak mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sumber daya yang terbatas untuk melakukan penelitian.

### **Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Penguatan Pendidikan Politik Berbasis Komunitas**

Pendidikan politik berbasis komunitas semakin diakui sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan warga. Dalam konteks ini, kolaborasi multi-stakeholder menjadi sangat penting. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dunia usaha, serta akademisi, dalam upaya mengembangkan dan memperkuat pendidikan politik di tingkat komunitas. Artikel ini akan membahas pengertian kolaborasi multi-stakeholder, peran masing-masing pemangku kepentingan, manfaat yang dapat diperoleh, serta tantangan yang dihadapi dalam penguatan pendidikan politik berbasis komunitas.

Penguatan pendidikan politik di Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dari berbagai sektor, termasuk partai politik, masyarakat, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan program pendidikan politik yang komprehensif, inklusif, dan berdampak luas serta berkelanjutan. Kolaborasi multi-stakeholder merujuk pada proses kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah kompleks. Dalam konteks pendidikan politik berbasis komunitas, kolaborasi ini mencakup interaksi antara pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan program-program pendidikan politik yang lebih efektif dan inklusif.

Melalui kolaborasi, program pendidikan politik dapat menjangkau masyarakat di berbagai lapisan, sehingga lebih inklusif. Kolaborasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk berbagi sumber daya, informasi, dan pengetahuan, sehingga dapat mengembangkan program yang lebih berkualitas. Proses kolaborasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam merancang metode pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan politik berbasis komunitas dan menyediakan pendanaan untuk program-program tersebut. Sebagai fasilitator, pemerintah dapat mempertemukan berbagai pihak untuk menciptakan kolaborasi yang efektif.

Organisasi masyarakat sipil sering kali menjadi penggerak utama dalam pendidikan politik, menyediakan pelatihan, seminar, dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil berperan sebagai advokat yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memperjuangkan hak-hak sipil. Lembaga pendidikan, seperti universitas dan sekolah, memiliki peran dalam mengembangkan kurikulum pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat melakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan politik yang dijalankan.

Sektor swasta dapat menyediakan sumber daya finansial dan material untuk mendukung program-program pendidikan politik yang berbasis komunitas. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan dapat berkontribusi pada pendidikan politik dengan mendukung kegiatan yang meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Masyarakat berperan sebagai penerima

manfaat dari pendidikan politik dan memberikan masukan untuk pengembangan program. Masyarakat dapat berperan sebagai aktivis lokal yang mendorong perubahan dan meningkatkan kesadaran politik di komunitas mereka. Universitas dan institusi pendidikan berperan sebagai mitra akademik utama yang menyediakan kajian ilmiah, model pembelajaran yang berbasis bukti, dan pelatihan kader yang terstruktur.

Melalui kemitraan ini, pendidikan politik mendapat landasan teoretis dan metodologis yang kuat, sehingga lebih profesional dan relevan dengan perkembangan dinamika politik. Di tingkat komunitas akar rumput, keterlibatan masyarakat langsung adalah kunci keberhasilan implementasi program pendidikan politik. Kegiatan yang bersifat partisipatif memperkuat rasa pemilikan masyarakat terhadap program sehingga hasilnya lebih efektif dan dapat berlanjut. Pendampingan dan fasilitasi oleh komunitas lokal membantu menyesuaikan materi dan pendekatan pendidikan politik sesuai dengan budaya dan kebutuhan sosial setempat.

Teknologi digital dan media sosial juga menjadi alat yang sangat penting dalam memperluas jangkauan dan interaktivitas pendidikan politik. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah, penyebaran informasi yang cepat, serta partisipasi aktif masyarakat dari berbagai wilayah geografis. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses edukasi politik dan mengurangi kesenjangan informasi antar lapisan masyarakat. *Best practices* dari berbagai kolaborasi lintas sektor menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan politik tidak hanya bergantung pada penyusunan kurikulum yang baik, tetapi juga pada manajemen kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan. Keterbukaan komunikasi, pembagian peran yang jelas, serta Fungsi Partai Politik dalam dukungan sumber daya yang memadai merupakan faktor kunci pencapaian hasil yang optimal.

Kolaborasi multi-stakeholder dapat meningkatkan kapasitas komunitas dalam memahami dan terlibat dalam proses politik. Melalui program pendidikan yang dihasilkan dari kolaborasi ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam politik. Masyarakat yang teredukasi tentang hak dan kewajiban politik mereka cenderung lebih terlibat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Kolaborasi ini mempromosikan kesadaran politik, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi. Melalui kerja sama, pemangku kepentingan dapat lebih efektif dalam menemukan solusi untuk masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Ini membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan dan merumuskan program yang saling menguntungkan. Meskipun kolaborasi membantu berbagi sumber daya, dalam praktiknya, sering kali ada keterbatasan dana, waktu, dan tenaga manusia yang dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan politik. Pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan sering kali diabaikan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi yang produktif.

Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering kali berkolaborasi dengan LSM untuk menyelenggarakan program pendidikan pemilih menjelang pemilu. Program ini dirancang untuk memberikan informasi tentang proses pemilihan, pentingnya memberikan suara, dan cara berpartisipasi secara aktif. Beberapa universitas di Indonesia bekerja sama dengan LSM untuk menyelenggarakan lokakarya dan seminar tentang isu-isu politik terkini. Program ini bertujuan untuk mendidik mahasiswa serta masyarakat umum mengenai pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa perusahaan besar di Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung pendidikan politik melalui program CSR mereka. Contohnya, perusahaan yang mendanai pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda di komunitas lokal, sehingga mengembangkan generasi pemimpin yang lebih sadar politik. Dengan demikian, kolaborasi multi-stakeholder bukan hanya memperkuat pendidikan politik berbasis komunitas tetapi juga memperkokoh fondasi demokrasi partisipatif di Indonesia.

## KESIMPULAN

1. Partai politik di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan politik. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan dalam sistem demokrasi, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, partai-partai berupaya untuk menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta membangun partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Keberhasilan pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara partai politik, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat menciptakan program pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan budaya politik yang lebih demokratis dan inklusif.
2. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pendidikan politik, tantangan seperti kurangnya kualitas kader, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan praktik politik uang masih menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya percaya pada partai politik sebagai alat untuk mencapai partisipasi yang lebih besar. Partisipasi aktif masyarakat dan mekanisme umpan balik sangatlah penting dalam evaluasi dan pengawasan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai. Masyarakat sipil harus memanfaatkan saluran komunikasi yang ada untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapan terhadap program pendidikan politik dalam rangka mempertahankan akuntabilitas.

## SARAN

1. Partai politik perlu terus meningkatkan kualitas dan kontinuitas program pendidikan politik. Mereka harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kebutuhan lokal melalui mekanisme feedback yang efektif, sehingga pendidikan politik dapat lebih relevan dan tepat sasaran.
2. Masyarakat sipil serta media massa harus didorong untuk lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi program pendidikan politik. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan.

## KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga tidak mengakomodasi data empiris dari praktik langsung di lapangan. Analisis terhadap studi kasus dilakukan berdasarkan sumber sekunder seperti dokumen hukum, literatur, dan berita resmi, tanpa melibatkan wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum atau pihak korporasi terkait. Selain itu, ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada sistem hukum Indonesia, tanpa mengkaji perbandingan dengan negara lain yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik berdasarkan undang-undang politik. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan empiris. Penting bagi partai politik untuk menguatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti institusi pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal. Melalui sinergi ini, partai politik dapat memperluas jangkauan dan dampak program pendidikan politik yang mereka laksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Turnip, et. al. Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diss. Lampung University, 2016
- Yuliono, Anton. "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya)." Jurnal Administrasi Publik (DIA) 11.1 (2013): 173-184.
- Limilia, Putri, and Evie Ariadne. "Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja." Jurnal Psikologi

- Sosial 16.1 (2018): 45-55.
- Hidayatuddin, Hidayatuddin, and Padrisan Jamba. "Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.6 (2024): 9045-9057.
- Antoni, J. (2025). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Revitalisasi Kurikulum. Jurnal Tadbiruna.
- Enus, O.E. (2025). Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil. Jurnal PGSD UNARS.
- Sahra, S. (2024). Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak sebagai Model Kolaborasi Multi-Stakeholder.
- Achmad, I.A. (2022). Pendidikan Politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jesfa Journal.
- Prihatmoko, S. (2003). Pendidikan Politik dan Partisipasi. Jurnal Pendidikan Politik, Vol. 2.
- Badrur, U. (2015). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum UMS.
- Mulia, A.A.M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya di Masyarakat. Jurnal Locus.
- Sihombing, M. (2024). Pendidikan Politik dalam Demokrasi. Jurnal Pendidikan Politik, Universitas Jambi.
- Ahmad, E. (2021). Dampak Pendidikan Politik Kader Partai terhadap Sikap Berpolitik. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratiwi, L. (2025). Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Triwikrama, Vol. 9 No. 1.
- Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. Lex Jurnalica.
- Hariyanti, H. (2018). "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik". Civics Journal.
- KPU RI (2023), "Pendidikan Politik Juga Jadi Tugas Partai"
- Hermawan, I.C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Politik dan Demokrasi.
- Nurdin, P.H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. JALREV, 1(2).
- Kusuma, I.G.W. (2020). "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik". Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Kasih, A. (2020). Kemitraan Guru dan Orang Tua dalam Pendidikan di Finlandia.
- Sahlberg, P. & Johnson, P. (2019). Transformasi Pendidikan di Finlandia.
- Priyanto, B. (2024). Multi Stakeholder Partnership untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. INFID.
- Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia.
- Syah Putra, D.K. (2015). Komunikasi CSR Politik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badrur, U. (2015). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum UMS.
- Alfian (1986). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan Gufron (2017), "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik" PH Nurdin (2019), "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik"
- Marwan Gufron, M. (2017). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik. Jurnal Dinamika Politik.
- KPU RI (2023). Pendidikan Politik Juga Jadi Tugas Partai. Komisi Pemilihan Umum.
- Syafinggi, H. (2009). Pendidikan Politik dan Demokrasi.
- Nur Khoiron, M. (2013). Pendidikan Politik dalam Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, M.D. (2018). Partai Politik dan Pendidikan Politik. Universitas Jakarta.
- Masriyani, M. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik. Wajah Hukum.
- Budiarjo, M. (1995). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia.
- FES Indonesia. (2023). Peran Partai Politik dalam Sistem Demokrasi. Friedrich Ebert Stiftung.
- Toloh, A. (2023). Politik Hukum Penguanan Partai Politik untuk Produk Hukum Demokratis.